

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- A. Rosyid Al Atok. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*. Setara Press. Malang. 2015.
- Abdoellah, Priyatmanto. *Revitalisasi Kewenangan PTUN*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. 2016.
- Abdullah, Ujang. *Upaya Administratif Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Pusdiklat MA RI, Bogor, 2009.
- Agung, Anak Putu dan Anik Yuesti. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. AB Publisher. Denpasar. 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS. Tangerang. 2018.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan administrasi di Indonesia*. Alumni. Bandung. 1985.
- \_\_\_\_\_. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Alumni. Bandung. 1985.
- Budiono, Abdul Rachmad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bayumedia Publishing, Malang. 2005.
- Dani, Umar. *Rekonstruksi Sistem Hukum Acara PTUN*. FH. UII Press. Yogyakarta. 2019.
- H.A. Muin Fahmal. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*, Cetakan Pertama. UII Press. Yogyakarta. 2006.

- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*. Udayana University Press. Denpasar. 2010.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu PerUndang-Undangan (1)*. Kanisius. Yogyakarta, 2011.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*. Sinar Harapan. Jakarta. 1993
- \_\_\_\_\_. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku I. Sinar Harapan. Jakarta. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II. Sinar Harapan. Jakarta. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku I. Sinar Harapan. Jakarta. 2003.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-empiris*. Alih Bahasa Drs. H. Somardi. BEE Media Indonesia. Jakarta. 2007.
- Khairani. *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 2016.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung. 1996.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Pengetahuan PerUndang-Undangan*. Mandar Maju. Bandung. 2009.

- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2008
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung. 2008
- Paulus Effendi Lotulung. *Beberapa Sistem Tentang Konrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Buana Ilmu Populer. Jakarta. 1986.
- Philipus M Hadjon, et.al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. cetakan ketujuh. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2001.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2011.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. cetakan ketiga. 1994.
- \_\_\_\_\_. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 1994.
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.

- \_\_\_\_\_. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
- \_\_\_\_\_. *Urgensi Upaya Administratif di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta.
- S.F. Marbun. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII-Press. Yogyakarta. 2001.
- \_\_\_\_\_. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta. 2011.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997.
- Salim H.S.dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
- \_\_\_\_\_. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi dan Refleksi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.19. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*. Universitas Indonesia. Jakarta. 1999.

- \_\_\_\_\_. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*. Universitas Indonesia. Jakarta. 1999.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986.
- Soemitro, Rochmat *Naskah Singkat tentang Peradilan Administrasi di Indonesia*. BPHN-Binacipta. Bandung. 1977.
- Supandi. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. PT. Alumni. Bandung. 2016.
- Usman, Rachmadi *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. P.T. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 2003.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya. 1986.
- Victor Yaved Neno. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.
- Yodi Martono Wahyunadi. *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Aura Publishing. Bandar Lampung. 2018.
- Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan, Pembentukan Undang-Undang Yang Berkelanjutan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
- Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- Yusrizal. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Lhokseumawe. Unimal Press. 2015.

## B. Jurnal

Moonti, Roy Marthen, Arifin Tumuhulawa, Yayan Hanapi, dkk. “Upaya Administratif Dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara”. (2022). *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol.9. No.3.

Safitri, Erna Dwi dan Nabitatus Sa’adah. “Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol.3 No.1.

Sugiharto, Hari dan Bagus Oktafian Abrianto. “Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara”. (2018). *Jurnal Arena Hukum* Vol.11 No.1.

V. Hadiyono. “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”. (Agustus 2022). *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* Vol.1 No.1.

## C. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1986 Nomor 77 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3344,

\_\_\_\_\_. Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2004 Nomor 35 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4380.

- \_\_\_\_\_. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009 Nomor 157 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5076.
- \_\_\_\_\_. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009 Nomor 160 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5079.
- \_\_\_\_\_. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2014 Nomor 6 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5494.
- \_\_\_\_\_. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2014 Nomor 7 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5495.
- \_\_\_\_\_. Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2014 Nomor 292 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5601.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara RI* tahun 2014 Nomor 123. *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 5539.
- \_\_\_\_\_. Nomor 79 tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. *Lembaran Negara RI*

tahun 2021 Nomor 175. *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 6705.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 1.

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. *Berita Negara RI* tahun 2018 Nomor 1586.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

\_\_\_\_\_. Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

\_\_\_\_\_. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.